

Gelombang Demokratisasi dan Kebangkitan Otoritarianisme: Pergulatan Nilai-Nilai Politik dalam Tatahan Global Kontemporer

Asrorul azizi^{1*}, Alpan ahmadi^{2*}

¹Program Studi Pendidikan IPA, Institut Pendidikan Nusantara Global, Lombok Tengah

²Program Studi Bahasa Indonesia, Institut Pendidikan Nusantara Global, Lombok Tengah

^{1*}asrorulazizi@gmail.com, ^{2*}alpanahma@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 1, Februari 2025

Page: 336-342

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1636>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1636>

Article History:

Received: 07-01-2025

Revised: 03-02-2025

Accepted: 07-02-2025

Abstrak : Gelombang demokratisasi yang melanda berbagai belahan dunia sejak akhir abad ke-20 telah menjadi fenomena penting dalam membentuk tatanan global kontemporer. Namun, bersamaan dengan itu, kebangkitan otoritarianisme kembali muncul sebagai respons terhadap tantangan internal maupun eksternal, termasuk krisis ekonomi, polarisasi politik, dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja demokrasi. Pergulatan nilai-nilai politik ini mencerminkan ketegangan antara idealisme demokratis seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi politik dengan pendekatan otoriter yang menekankan stabilitas, kontrol negara, dan efisiensi pemerintahan. Dinamika ini tidak hanya memengaruhi konstelasi politik di tingkat nasional, tetapi juga mengubah arah hubungan internasional, norma hak asasi manusia, serta mekanisme kerja sama global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme, dampaknya terhadap tatanan politik dunia, serta implikasinya bagi masa depan tata kelola global. Dengan pendekatan deskriptif-analitis dan tinjauan teori politik komparatif, tulisan ini berupaya memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas pergulatan nilai-nilai politik dalam konteks globalisasi yang terus berkembang.

Kata Kunci: Demokratisasi, Otoritarianisme, Kontemporer, Nilai, Globalisasi

PENDAHULUAN

Gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme merupakan dua fenomena politik global yang saling bertentangan namun justru saling mempengaruhi dalam tatanan dunia kontemporer. Sejak akhir abad ke-20, banyak negara mengalami transformasi politik menuju sistem demokratis, didorong oleh tuntutan masyarakat akan kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi politik. Gelombang ini sering dikaitkan dengan runtuhnya rezim-rezim otoriter di Eropa Timur setelah berakhirnya Perang Dingin, transisi demokrasi di Amerika Latin, serta proses reformasi politik di Asia dan Afrika. Demokratisasi pada masa itu dianggap sebagai puncak kemenangan nilai-nilai liberal yang mengedepankan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum. Namun, optimisme akan masa depan demokrasi tidak berlangsung tanpa tantangan. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia justru menyaksikan kebangkitan kembali

otoritarianisme, baik dalam bentuk rezim otoriter yang semakin mengokohkan kekuasaan maupun demokrasi elektoral yang secara bertahap mengalami kemunduran (Huntington et al., 1995).

Fenomena kebangkitan otoritarianisme ini dipicu oleh berbagai faktor. Di satu sisi, kekecewaan masyarakat terhadap kinerja demokrasi, terutama dalam menangani ketidaksetaraan ekonomi, korupsi, dan polarisasi politik, telah mendorong sebagian publik untuk merindukan stabilitas dan ketertiban yang sering diidentikkan dengan pemerintahan otoriter. Di sisi lain, dinamika global seperti krisis keuangan, konflik geopolitik, dan tantangan globalisasi memperkuat narasi bahwa demokrasi liberal tidak selalu menjadi solusi bagi semua masalah. Dalam konteks ini, beberapa pemimpin dunia mengambil keuntungan dengan memusatkan kekuasaan, membatasi kebebasan sipil, dan mengedepankan nasionalisme sebagai legitimasi untuk mempertahankan stabilitas domestik. Pergulatan nilai-nilai politik antara demokrasi dan otoritarianisme kemudian menjadi isu penting yang membentuk arah politik global kontemporer (Milia & Attamimi, 2025).

Tatanan global kontemporer yang semakin kompleks turut memperkuat ketegangan ini. Globalisasi, dengan segala dampak positifnya dalam mempermudah pertukaran informasi, perdagangan, dan budaya, juga melahirkan tantangan serius berupa ketimpangan ekonomi, migrasi massal, dan ancaman terhadap identitas budaya lokal. Di banyak negara, fenomena ini memicu keresahan sosial yang dieksploitasi oleh aktor politik untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan-kebijakan proteksionis dan pemerintahan yang lebih otoriter. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan media sosial, yang awalnya dianggap sebagai instrumen penguatan demokrasi melalui kebebasan berekspresi, kini sering digunakan sebagai alat propaganda, disinformasi, dan pengawasan yang memperkuat kontrol rezim otoriter (Giyandri & Basuki Sinaga, 2024).

Pergulatan nilai-nilai politik ini tidak hanya berdampak di tingkat nasional, tetapi juga mengubah dinamika hubungan internasional. Negara-negara demokratis dan otoriter sering kali memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia, keamanan internasional, dan perdagangan bebas. Ketegangan ini tercermin, misalnya, dalam perbedaan sikap terhadap intervensi kemanusiaan, pengaturan internet, atau kesepakatan perubahan iklim. Selain itu, kebangkitan kekuatan-kekuatan besar dengan kecenderungan otoritarian, seperti Tiongkok dan Rusia, turut menggeser keseimbangan kekuatan global dan menantang dominasi nilai-nilai demokratis yang sebelumnya didorong oleh negara-negara Barat (Ernada et al., 2024). Di sisi lain, demokratisasi masih terus berkembang di berbagai belahan dunia meskipun menghadapi tantangan besar. Negara-negara di Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, dan Amerika Latin menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat untuk kebebasan dan partisipasi politik belum padam. Namun, proses demokratisasi ini sering diwarnai oleh konflik internal, lemahnya institusi politik, dan pengaruh aktor-aktor global yang berkepentingan. Pergulatan antara demokrasi dan otoritarianisme dalam konteks ini menjadi semacam tarik-menarik yang menentukan arah masa depan tata kelola global (Jalil, 2020).

Selain faktor-faktor struktural dan institusional, dinamika nilai-nilai budaya dan identitas politik juga berperan penting dalam fenomena ini. Demokrasi sering dipandang sebagai nilai universal, tetapi dalam praktiknya, penerapan demokrasi tidak terlepas dari konteks budaya dan sejarah masing-masing negara. Sebaliknya, otoritarianisme juga tidak selalu identik dengan represi brutal; beberapa rezim otoriter berhasil mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sehingga memperoleh legitimasi dari sebagian masyarakat. Pertanyaan tentang apakah

demokrasi selalu lebih unggul dibandingkan sistem otoriter terus menjadi bahan perdebatan dalam kajian politik global (Zahro'Amika et al., 2024).

Tatanan global saat ini menunjukkan bahwa demokratisasi dan otoritarianisme bukanlah dua kutub yang sepenuhnya terpisah, melainkan bagian dari spektrum politik yang saling memengaruhi. Banyak negara menunjukkan karakteristik campuran, di mana praktik demokrasi prosedural berjalan berdampingan dengan kecenderungan otoriter, misalnya melalui pembatasan media, manipulasi pemilu, atau pengekangan kebebasan sipil. Fenomena ini dikenal sebagai “demokrasi iliberal” atau “otoritarianisme kompetitif,” yang menandakan semakin kaburnya batas antara dua sistem tersebut (Prasetyo et al., 2025).

Konteks globalisasi juga memunculkan dimensi baru dalam pergulatan nilai-nilai politik ini. Di satu sisi, globalisasi memfasilitasi penyebaran gagasan-gagasan demokratis melalui jaringan internasional, media global, dan lembaga-lembaga multilateral. Di sisi lain, globalisasi juga memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa identitas budaya dan kedaulatannya terancam oleh pengaruh eksternal. Reaksi ini sering dimanfaatkan oleh rezim otoriter untuk memperkuat legitimasi mereka dengan retorika anti-globalisasi dan proteksionisme. Dengan demikian, hubungan antara demokrasi, otoritarianisme, dan globalisasi bersifat timbal balik dan kompleks (Hasan et al., 2024).

Peran aktor-aktor non-negara dalam dinamika ini juga tidak dapat diabaikan. Organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan gerakan sosial transnasional memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, rezim otoriter sering kali merespons dengan memperketat kontrol atas organisasi sipil dan membatasi ruang gerak aktivis. Selain itu, perusahaan-perusahaan teknologi global memiliki pengaruh besar dalam membentuk ekosistem informasi yang dapat memperkuat baik demokrasi maupun otoritarianisme. Misalnya, algoritma media sosial dapat digunakan untuk memperluas wacana publik yang demokratis, tetapi juga rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau memperkuat polarisasi (Hidayat & Yuliestiana, 2024).

Dalam konteks geopolitik, kompetisi antara negara-negara demokratis dan otoriter semakin jelas terlihat. Blok-blok kekuatan baru muncul, dengan beberapa negara memilih pendekatan non-blok atau pragmatis untuk menjaga kepentingan nasional mereka. Hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh satu sistem nilai tertentu, tetapi menjadi arena di mana berbagai ideologi bersaing untuk memperoleh pengaruh. Situasi ini memperlihatkan bahwa masa depan tatanan global tidak dapat diprediksi dengan mudah. Apakah dunia akan bergerak menuju penguatan demokrasi, atau justru menyaksikan konsolidasi otoritarianisme, masih menjadi pertanyaan terbuka yang memerlukan kajian lebih mendalam (Aprillia et al., 2024).

Urgensi untuk memahami pergulatan nilai-nilai politik ini semakin besar mengingat dampaknya terhadap stabilitas global dan kesejahteraan masyarakat. Demokratisasi yang gagal dapat memicu kekacauan politik, perang saudara, atau krisis kemanusiaan. Sebaliknya, otoritarianisme yang semakin menguat dapat mengancam kebebasan individu dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, kajian tentang dinamika antara demokratisasi dan otoritarianisme bukan hanya relevan bagi ilmu politik, tetapi juga penting bagi pembuat kebijakan, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat global secara keseluruhan.

Pendahuluan ini berupaya memberikan kerangka pemahaman tentang bagaimana gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme membentuk tatanan global kontemporer. Dengan menyoroti faktor-faktor pendorong, konteks globalisasi, dan implikasi geopolitik, tulisan ini bertujuan untuk mengajak pembaca melihat fenomena ini secara lebih kritis. Tidak hanya sekadar melihat demokrasi dan otoritarianisme sebagai dua sistem yang saling

bertentangan, tetapi juga memahami bagaimana keduanya berinteraksi, beradaptasi, dan bahkan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Dengan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi wacana politik global yang lebih inklusif dan reflektif. Dalam era di mana arus informasi begitu cepat dan batas-batas negara semakin kabur, pemahaman yang mendalam tentang pergulatan nilai-nilai politik menjadi kunci untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam membangun tata kelola global yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, membahas gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme bukan hanya upaya akademis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab intelektual untuk memahami dan membentuk masa depan dunia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan untuk memetakan serta memahami secara mendalam fenomena gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme di tingkat global. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal akademik, buku-buku teori politik komparatif, laporan lembaga internasional, serta artikel berita yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menafsirkan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab, konteks sosial-politik, dan dinamika internasional yang memengaruhi perubahan pola kekuasaan global. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyoroti interaksi kompleks antara nilai-nilai demokrasi dan praktik otoritarianisme dalam berbagai kasus di dunia.

Selanjutnya, metode ini menggunakan kerangka teori politik komparatif dan global governance untuk menganalisis dampak fenomena tersebut terhadap tatanan politik internasional. Proses analisis melibatkan peninjauan komparatif antarnegara dan kawasan, dengan mempertimbangkan variabel seperti krisis ekonomi, polarisasi politik, dan respons masyarakat terhadap kinerja demokrasi. Hasil analisis deskriptif kemudian dipadukan dengan interpretasi kritis terhadap implikasi jangka panjang bagi mekanisme kerja sama global, norma hak asasi manusia, dan stabilitas hubungan internasional. Dengan demikian, metode ini memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang pergulatan nilai-nilai politik dalam konteks globalisasi yang dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Dalam tatanan global kontemporer, keduanya saling memengaruhi dan berinteraksi dalam konteks yang beragam. Untuk memahami fenomena ini, diperlukan analisis deskriptif yang menelusuri faktor-faktor pendorong, pola-pola yang muncul di berbagai kawasan, serta dampaknya terhadap tatanan global.

Salah satu pendorong utama gelombang demokratisasi adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh kebebasan dan hak-hak politik. Sejak berakhirnya Perang Dingin, banyak negara yang sebelumnya diperintah oleh rezim otoriter mulai beralih ke sistem demokrasi. Runtuhnya Uni Soviet membuka jalan bagi negara-negara Eropa Timur untuk melakukan reformasi politik yang mendasar. Polandia, Ceko, dan negara-negara Baltik menjadi contoh bagaimana transisi demokrasi dapat berlangsung relatif damai dan berhasil menciptakan institusi politik yang lebih terbuka. Di Amerika Latin, demokratisasi juga berkembang setelah dekade

1980-an, ketika rezim militer mulai kehilangan legitimasi akibat krisis ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Fenomena serupa terjadi di beberapa negara Asia, seperti Indonesia, yang mengalami reformasi besar pada 1998 setelah kejatuhan rezim Orde Baru.

Namun, gelombang demokratisasi ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak negara yang mengalami transisi demokrasi justru menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi. Lembaga-lembaga demokratis sering kali belum matang, partai politik tidak memiliki basis yang kuat, dan korupsi tetap menjadi masalah besar. Di beberapa negara, kegagalan demokrasi untuk memberikan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat menyebabkan kekecewaan publik. Dalam kondisi seperti ini, kebangkitan otoritarianisme menjadi respons yang dianggap lebih cepat dan efektif untuk mengatasi krisis.

Kebangkitan otoritarianisme juga terlihat jelas dalam dua dekade terakhir. Negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap globalisasi dan kebijakan Barat untuk memperkuat kontrol negara dan menantang tatanan dunia berbasis nilai-nilai liberal. Di Rusia, konsolidasi kekuasaan di bawah Vladimir Putin disertai dengan pembatasan kebebasan media, pembungkaman oposisi politik, dan intervensi dalam pemilu luar negeri. Di Tiongkok, Partai Komunis memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat untuk membenarkan kontrol ketat terhadap kebebasan sipil dan pengawasan digital yang masif.

Fenomena serupa juga terjadi di beberapa negara demokrasi. Istilah “demokrasi iliberal” menggambarkan situasi di mana pemilu tetap berlangsung, tetapi prinsip-prinsip demokrasi substantif, seperti kebebasan pers, independensi peradilan, dan hak-hak minoritas, mengalami erosi. Hungaria dan Turki menjadi contoh bagaimana pemimpin terpilih dapat mempersempit ruang demokrasi sambil tetap memanfaatkan legitimasi pemilu. Dalam konteks ini, demokrasi dan otoritarianisme tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang tegas, tetapi sebagai spektrum di mana banyak negara berada di antaranya.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam pergulatan ini. Krisis keuangan global 2008, meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan globalisasi yang tidak merata telah melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap model demokrasi liberal. Ketika demokrasi gagal memberikan keadilan ekonomi, muncul narasi bahwa rezim otoriter dapat menawarkan stabilitas dan pertumbuhan yang lebih baik. Tiongkok sering dijadikan contoh model pembangunan otoriter yang dianggap lebih efisien dibandingkan demokrasi yang memakan waktu panjang untuk mencapai konsensus.

Selain itu, perkembangan teknologi digital telah menciptakan paradoks. Di satu sisi, media sosial dan internet memungkinkan mobilisasi gerakan demokratis, seperti yang terlihat dalam Arab Spring pada awal 2010-an. Di sisi lain, teknologi yang sama digunakan oleh rezim otoriter untuk memantau warganya, menyebarkan propaganda, dan melemahkan oposisi. Perusahaan teknologi global juga memainkan peran ganda, terkadang mendukung kebebasan informasi, tetapi juga tunduk pada tekanan pemerintah untuk menyensor konten atau menyediakan data pengguna.

Dalam hubungan internasional, gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme mengubah keseimbangan kekuatan global. Blok negara-negara demokratis, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, menghadapi tantangan besar dari kekuatan otoriter yang semakin percaya diri. Persaingan antara kedua kubu ini terlihat dalam berbagai isu, termasuk perdagangan, keamanan siber, dan perubahan iklim. Sementara itu, negara-negara berkembang sering memilih sikap pragmatis, bekerja sama dengan kedua pihak untuk melindungi kepentingan nasional mereka tanpa terlalu terikat pada satu ideologi.

Dampak dari pergulatan nilai-nilai politik ini juga terasa dalam isu hak asasi manusia. Demokratisasi mendorong penguatan norma internasional terkait kebebasan dan kesetaraan, tetapi kebangkitan otoritarianisme memunculkan resistensi terhadap intervensi internasional. Beberapa negara berargumen bahwa prinsip kedaulatan negara lebih penting daripada norma global tentang hak asasi manusia. Akibatnya, mekanisme kerja sama internasional sering menemui jalan buntu ketika menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim otoriter.

Perubahan dalam tatanan global juga terlihat pada lembaga-lembaga internasional. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik yang semakin terpolarisasi. Perbedaan pandangan antara negara-negara demokratis dan otoriter sering menghambat pengambilan keputusan, baik dalam isu perdamaian, perubahan iklim, maupun keamanan global. Dalam kondisi ini, pergulatan nilai-nilai politik antara demokrasi dan otoritarianisme menjadi faktor yang menentukan efektivitas kerja sama multilateral.

Fenomena ini juga memiliki dimensi budaya. Globalisasi membawa nilai-nilai demokratis ke seluruh dunia, tetapi juga memicu reaksi balik dari kelompok-kelompok yang merasa identitas budaya mereka terancam. Dalam beberapa kasus, rezim otoriter memanfaatkan sentimen nasionalis atau keagamaan untuk memperkuat legitimasi mereka. Mereka mengklaim bahwa demokrasi adalah produk Barat yang tidak sesuai dengan tradisi lokal. Hal ini terlihat dalam retorika politik di berbagai negara Asia dan Timur Tengah yang menolak tekanan internasional untuk melakukan liberalisasi politik.

Di sisi lain, masyarakat sipil global terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Gerakan pro-demokrasi, baik di Hong Kong, Myanmar, maupun Belarusia, menunjukkan bahwa aspirasi untuk kebebasan politik tetap hidup meskipun menghadapi represi berat. Perjuangan mereka mengingatkan dunia bahwa demokratisasi bukanlah proses linear, tetapi jalur yang penuh liku dan sering kali menghadapi kemunduran.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi, pergulatan antara demokrasi dan otoritarianisme juga memiliki dampak langsung terhadap stabilitas pasar dan investasi internasional. Ketidakpastian politik di negara-negara demokrasi dapat memengaruhi keputusan investasi, sementara model pembangunan otoriter yang stabil sering menarik modal asing meskipun mengabaikan hak-hak politik. Namun, ketergantungan ekonomi pada negara-negara otoriter juga menimbulkan dilema etis bagi perusahaan dan pemerintah demokratis. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme adalah bagian dari realitas politik global yang saling terkait. Tidak ada jawaban tunggal untuk menentukan arah masa depan dunia, tetapi fenomena ini memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam memahami dinamika politik global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pergulatan antara gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme mencerminkan kompleksitas tatanan global kontemporer. Demokrasi telah membuktikan dirinya sebagai sistem yang mampu memberikan ruang bagi kebebasan individu, partisipasi politik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, kegagalan demokrasi dalam memenuhi harapan ekonomi dan sosial di beberapa negara telah memunculkan keraguan terhadap kelangsungannya. Di sisi lain, otoritarianisme menunjukkan kemampuannya untuk memberikan

stabilitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan, tetapi sering dilakukan dengan mengorbankan kebebasan sipil dan hak-hak dasar warga negara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antara demokrasi dan otoritarianisme semakin kabur. Banyak negara berada di area abu-abu, mempraktikkan elemen-elemen demokratis sambil mempertahankan kontrol otoriter. Situasi ini menuntut kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana institusi politik, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai budaya mempengaruhi dinamika tersebut. Dalam hubungan internasional, kompetisi antara negara-negara demokratis dan otoriter memperumit kerja sama global. Tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan keamanan siber memerlukan kolaborasi lintas ideologi. Namun, perbedaan nilai sering menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi yang lebih inklusif dan pragmatis untuk menghadapi realitas geopolitik saat ini.

Meskipun kebangkitan otoritarianisme tampak menguat, aspirasi untuk demokrasi belum pudar. Gerakan pro-demokrasi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi politik tetap memiliki daya tarik yang kuat. Masa depan tatanan global kemungkinan akan ditentukan oleh kemampuan masyarakat global untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan stabilitas dan keinginan untuk kebebasan. Dengan demikian, studi tentang gelombang demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme tidak hanya penting bagi ilmuwan politik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, aktivis, dan warga dunia. Pergulatan nilai-nilai politik ini adalah cermin dari dinamika kekuasaan, aspirasi manusia, dan tantangan global yang terus berkembang. Hanya dengan memahami kompleksitas ini, dunia dapat bergerak menuju tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, B. R., Megantara, B. A., & Gunawan, R. (2024). Model Politik yang Mempengaruhi Negara-Negara Muslim. *Indonesian Gender and Society Journal*, 5(1).
- Ernada, S. E. Z., Molasy, H. D., & Prabhawati, A. (2024). *Nasionalisme dan Etnopolitik dalam Hubungan Internasional: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Indonesia Emas Group.
- Giyandri, T. F., & Basuki Sinaga, J. B. (2024). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(3).
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73–82.
- Hidayat, A., & Yuliestiana, A. D. T. (2024). *Memaknai Transnasionalisme: Agen, Struktur, dan Proses dalam Politik Global*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huntington, S. P., Marjohan, A., & Abadi, A. S. (1995). *Gelombang demokratisasi ketiga*. Pustaka Utama Grafiti.
- Jalil, A. (2020). Kompatibilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 8(1), 430–445.
- Milia, J., & Attamimi, S. (2025). Dinamika Transfigurasi Tata Kelola Global: Posisi Indonesia dalam Restrukturisasi Lanskap Geopolitik Melalui Ekspansi BRICS. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 3(2), 1–9.
- Prasetyo, D. Y., Norrahman, F. H., Ramadhani, A. D., Hilmiyah, N., Nurharizah, S., Malika, V., & Fuad, M. Y. (2025). *Strategi Kebijakan Global: Demokrasi, Ekonomi, dan Hubungan Internasional*. Penerbit: Kramantara JS.
- Zahro'Amika, F., Sukmana, O., & Susilo, R. K. D. (2024). Dinamika Politik Identitas: Implikasi Terhadap Keberlanjutan Demokrasi dalam Tinjauan Literatur. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.